

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Pillo, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa: Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan hukum*. Penerbit: Sinar grafika: Jakarta.
- Alfitra, 2017, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses: Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Dalam Buku : Tolib Effendi *Dasar -Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press: Surabaya.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Bagir Manan, 1992, “*Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*”, Penerbit Ind-Hill.co: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana: Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta.
- Eman Suparman, 2004, *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, Fokus Media: Bandung.
- Franz Magnis Suseno, 1987, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Pustaka Filsafat: Jakarta.
- H.C. G. Maas, 1980, *Constitutionele Onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht*, Deventer: Kluwer.
- H.Agus Takariawan, 2019, *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia*, Pustaka reka cipta: Bandung.
- H. Franken, 1997, *Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke*, Gouda Quhnt.
- Hadi Machram dan Marjan Miharja, 2019, *Asas Manfaat Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*, Qiara Media: Pasuruan.

- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi)*, Mandar Maju: Bandung.
- Irsan Koesparmono., & Armansyah, 2019, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Gramata Publishing: Bekasi.
- Jimly Asshiddiqie. 2006, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing: Malang.
- Kees Bertens, 20002, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris, Jerman* , Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- M. Solly Lubis, 1989, “*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*”, Penerbit CV Mandar Maju: Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2020, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Khusus Sinar Grafika: Jakarta.
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Aji, 1980, *Peradilan Bebas dan Contempt of Courts*, Diadit Media: Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Rivai, A. 2009, *Peradilan yang Bersih dan Imparsial*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metode Penelitian hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya: Bandung.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia: Bogor.
- R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional: Surabaya.
- Soebekti, 1982, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- R. Soebekti, 1985, *Hukum Acara Pidana*. Bina Cipta: Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penemuan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo: Jakarta.
- Sri Sutatiek, 2013, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara*, Aswaja Pressindo: Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta.
- Sudarto, 1986, *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, Alumni: Bandung.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH)*: Jakarta.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, Setara Press: Malang.
- Widiyanto, H., & Sudarmaji, W. 2022, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Eureka Media Aksara: Jawa Tengah.
- Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.

B. Jurnal, Skripsi, Thesis

- A.H. Lubis, J. Lubis, dan S. Rizal, 2022, "Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman yang Berintegritas dan Bermartabat," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 1.
- Anidah Nurhatifah, 2016, "Kedudukan alat bukti surat elektronik (email) dihubungkan dengan KUHAP jo UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung*.
- B.T. Putri, & C. A. F. Zakaria, 2022, Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X dihubungkan dengan KUHAP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1).
- Endri Rahmawati, 2022, Kajian Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Bebas Perkara Pembantuan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/Pn Blb), *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*.
- H.Muslih Rais, 2017, Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al-Daylah*, Vol. 6/No.1/Juni.
- Hetty Hassanah, 2011, Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Majalah Ilmiah UNIKOM*; Vol. 8 No. 2.
- Insanul Abrar dan Zetria Erma, 2023, *Analisis Hukum Tentang Surat Dakwaan yang Dibatalkan*, *UPMI Proceeding Series: 1st UPMI International Conference Multidisciplinary Science*, *Skripsi*, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan.
- Ismaya, H., Sekartaji, F. L. P. D., Rahma, A. A., Senega, D. F. F., & Krisdianti, T. Kristalisasi, 2023, Beracara Terhadap Penerapan Putusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4).
- Jemmy Mariangi, 2013, "Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Dipersidangan Melalui Teleconference", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Volume 1.
- Johan Wahyudi, 2012, Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII, No.2 Tahun 2012, Edisi Mei.

Manik,R.,Sihite,I.P.,Tambunan,D,Y.,& Sianipar ,W.H., 2020, Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN.Mdn) *Jurnal Ilmiah Simantek* ,4(2).

Ni Made Rit Meidyana, Ida Bagus Wyasa Putra, 2019, “*Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi*”, Program Kekhususan Peradilan.

Salut Murniasih, “Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pid.Sus/2016/Pn.Bbs)”, *Jurnal Verstek*, Volume 7, Nomor 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

Soejadi, 2023, *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tsani, Muhammad Saiful, 2024, Ketidackermatan Jaksa Penuntut Umum (Jpu) Dalam Menerapkan Pasal Dakwaan Sebagai Dasar Hakim Memutus Bebas (Studi Kasus Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/Pn.Skg). *Masters Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.

Wahyu Alamsyah Septian Ardinata,2013, Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Memutus Pasal Yang Tidak Didakwakan Dalam Surat Dakwaan Ditinjau Dari Segi Hak Terdakwa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg), *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember*.

C. Peraturan Perundang-undangan

Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN.Srh.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUH AP)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung RI, *Penemuan hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI

Mahkamah Konstitusi RI, 2010, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Internet/Website

Sovia Hasanah, Arti Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis-sosiologis-danyuridis/> diakses pada
30 November 2020.